

BSSN PEGANG KENDALI PENGAWASAN

Hadi Pastikan PDNS 2 Pulih Juli Ini

JAKARTA (KR) - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) RI Hadi Tjahjanto memastikan layanan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 pulih bulan ini.

Upaya yang dilakukan Hadi dan jajaran Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Badan Siber Sandi Negara (BSSN) yakni mem-back-up atau mencadangkan PDNS 2 dengan cold site yang akan ditingkatkan dengan hot site di Batam.

"Ini membahas tindak lanjut perintah Bapak Presiden agar seluruh layanan publik dapat kembali normal pada Juli 2024," kata Hadi dalam jumpa pers di kantor Menko Polhukam RI Jakarta Pusat, Senin (1/7).

Seperti diketahui, hot site adalah sistem yang mengatur penggunaan data cadangan lokasi fisik alternatif. Tidak sampai di situ, pihak Menko Polhukam juga mengupayakan perlindungan data yang berlapis dari PDNS 2 dengan cloud yang dipantau langsung oleh BSSN.

"Setiap pemilik data center juga memiliki backup, sehingga paling tidak ada tiga lapis sampai empat lapis backup tersebut, kemudian juga akan kita backup dengan cloud cadangan," terang Hadi.

Dengan demikian, lanjut Hadi, data yang bersifat statistik dari setiap instansi bisa dicadangkan di cloud, sehingga data di PDNS 2 tidak penuh. Dengan pengerahan hot site sebagai penyedia cadangan data, Hadi yakin seluruh situs kementerian ataupun lembaga yang datanya di PDNS 2 bisa kembali beroperasi.

Sebelumnya, pada Senin (24/6), pemerintah melalui BSSN serta Kemenkominfo mengidentifikasi sebanyak 211 instansi yang terdampak insiden serangan siber PDNS 2. Pada Selasa (25/6), teridentifikasi ada sebanyak 282 instansi yang terimbas insiden PDNS 2.

Namun, pada Rabu (26/6), tercatat sudah ada sebanyak 44 instansi yang siap untuk melakukan pemulihan data, sementara sisanya masih dalam proses. Dari semua itu, lima instansi telah melayani kembali masyarakat setelah melakukan migrasi data.

Pada kesempatan itu, Menko Polhukam Hadi Tjahjanto mengatakan, BSSN akan memegang

kendali dalam pengawasan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2. "BSSN juga akan terus meningkatkan keamanan siber dengan cara menyambungkan ke komando kendali BSSN yang ada di Ragunan," kata Hadi.

Hal tersebut, kata Hadi, perlu agar pengawasan PDNS 2 bisa dilakukan dengan mudah karena terkoordinasi dengan BSSN. Pemantauan oleh BSSN, lanjutnya, akan mencakup data hingga aktivitas pegawai di PDNS 2 dalam menerima notifikasi tertentu.

Tidak hanya itu, BSSN juga akan mengawasi penggunaan password (kode keamanan) di internal PDNS 2. Hal tersebut, menurut Hadi, perlu diawasi karena salah satu penyebab diretasnya PDNS 2 adalah penggunaan password yang terdeteksi.

"Dari hasil forensik, kami sudah bisa mengetahui siapa user yang selalu menggunakan password-nya dan akhirnya terjadi permasalahan yang sangat serius ini," ujar Menko Polhukam.

Dengan melibatkan BSSN dalam pengawasan, ia yakin keamanan data instansi pemerintah yang ada di dalam PDNS 2 makin terjaga.

(Ant/Obi)-d

PIDATO SANDIAGA SALAHUDDIN UNO (MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF RI) Pada Dies Natalis Ke-45 UTDI 1 Juli 2024



Dr. H. Sandiaga Salahuddin Uno, BBA MBA (Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia)

UNIVERSITAS Teknologi Digital Indonesia (UTDI) menggelar Dies Natalis Ke-45 dan Lustrum ke-9 pada Senin (1/7/2024) di kampus setempat Jalan Raya Janti (Majapahit) 143 Yogyakarta. 45 tahun lalu tepatnya 30 Juni 1979 lembaga ini didirikan oleh 5 orang kerabat yang akan menjadi sarana yang paling dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat modern. Diawali dengan didirikannya YPWB sebagai badan hukum yang mewadahi dan pada hari itu pula didirikan Akademi Aplikasi Komputer (AKAKOM). Selanjutnya tahun 1985 berkembang menjadi AMIK AKAKOM, pada tahun 1992 menjadi STMIK AKAKOM, selanjutnya terus dikembangkan dan pada tanggal 27 Oktober 2021 mendapatkan SK Mendikbudristek menjadi UTDI.

Perjalanan 45 tahun tersebut telah mampu membawa UTDI menjadi Perguruan Tinggi yang lebih dewasa dan mapan dengan semua



dinamikanya baik dinamika internal organisasi maupun mengikuti dinamika eksternal dalam masyarakat. Bersyukur pula UTDI tumbuh dan berkembang di Yogyakarta sebagai kota pendidikan yang istimewa dengan keluhuran budaya dan semua kearifannya. Sehingga transfer ilmu pengetahuan, keahlian dan nilai-nilai kehidupan akan mampu membentuk karakter yang khas sebagai ahli-ahli IT yang mumpuni di bidangnya dengan tetap memegang etika serta nilai-nilai luhur sebagai bangsa Indonesia terutama kearifan Yogyakarta yang mengedepankan kejujuran, sopan santun dan saling menghormati.

Pada seremonial yang dihadiri para sivitas akademika UTDI, pejabat pemerintahan, tokoh masyarakat serta para tamu undangan, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Sandiaga Salahuddin Uno, memberikan pidato Dies Natalis secara virtual. Berikut cuplikan pidato dari Sandiaga Salahuddin Uno:

"Saya Sandiaga Salahuddin Uno Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia mengucapkan selamat Dies Natalis ke-45 Lustrum ke-9 Universitas Teknologi Digital Indonesia (UTDI) serta penyelenggaraan kegiatan dengan tema Inovasi Digital Ekonomi Kreatif Mendukung Pariwisata Berkelanjutan atau Sustainability Tourism. Harapannya melalui penyelenggaraan event ini para pelaku sektor parekras dapat menerapkan teknologi tepat guna dalam meningkatkan

nilai tambah. Meningkatkan kapasitas tentu akan berdampak positif bagi industri pariwisata dan ekraf sehingga kami merasa bahwa kita mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Berkaitan dengan Travel Tourism Development Index tahun 2024, prestasi saat ini Indonesia masuk di peringkat 22 dunia. Target Menteri ke depan setelah saya, ini harus naik masuk menjadi top twenty. Syukur-syukur ke depan nanti kita bisa menjadi top ten. Berkat kolaborasi semua pihak, capaian ini kita bisa masuk di angka 22. Itu berarti kita masuk di level dunia. Jadi ini kancah yang kita mainkan lagi. Kita semakin jauh meninggalkan Malaysia, Thailand, Vietnam dan Filipina. Kita semakin ada di level dunia bersama Amerika, Spanyol, Negara Asia yang di atas kita itu cuma ada beberapa, hanya Korea, Jepang, Singapura. Ini merupakan pencapaian yang sangat-sangat patut kita syukuri dan harus terus kita akselerasi. Sehingga target-target ke depan kepada Menteri yang akan melanjutkan di Bulan Oktober 2024 ini bisa lebih menghadirkan pariwisata kita yang memiliki kekuatan menjadi pariwisata kelas dunia.

Saya yakin Universitas Teknologi Digital Indonesia sebagai wadah edukasi mampu memberikan yang terbaik dalam melahirkan dan meningkatkan digital talent yang berjiwa produktif, edukatif, koperatif, adaptif dan berdaya saing. Sehingga kita dapat melakukan upskilling, reskilling, newskilling, menghasilkan produk-produk berkualitas yang berdaya saing global, serta mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi Indonesia dan pencapaian Indonesia Emas 2045." (*)

UNIVERSITAS TEKNOLOGI DIGITAL INDONESIA | www.utdi.ac.id

PENDAFTARAN CAPIM KPK

Pansel Bantah Tak Diminati

JAKARTA (KR) - Ketua Panitia Seleksi Calon Pimpinan (Capim) dan Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Muhammadiyah Yusuf Ateh membantah anggapan pendaftaran posisi strategis di lembaga antirasuah itu tak diminati masyarakat.

Hingga Senin, 1 Juli 2024, tercatat baru 10 orang mendaftarkan diri sebagai Capim dan 16 orang sebagai Calon Dewas KPK. "Kan baru mulai (masa pendaftaran). (Banyak orang) sudah buat akun kok," kata Yusuf ketika ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (1/7).

Menurutnya, para pendaftar pasti memerlukan banyak waktu untuk menyiapkan dokumen yang diperlukan. Itu bukan berarti pendaftaran Capim dan Calon Dewas KPK sepi peminat. "Kan (perlu) dokumen. Nanti (mendaftar melampirkan) dokumen. Kan perlu waktu itu, biasalah," ucapnya.

Yusuf meminta masyarakat sabar

menunggu karena dirinya meyakini akan banyak orang yang tertarik mengisi jabatan di KPK. "Pokoknya tunggu saja. Tunggu saja. Percayalah," ujarnya.

Pendaftaran Capim dan Calon Dewas KPK dibuka selama 20 hari, yaitu pada 26 Juni hingga 15 Juli 2024. Artinya pada Senin, maka masa pendaftaran tinggal 14 hari lagi. Untuk mendaftar sebagai Capim dan Calon Dewas KPK, pendaftar harus terlebih dahulu membuat akun di laman <https://apel.setneg.go.id/>. Pada Senin, sebanyak 318 aktivitas registrasi akun untuk mendaftarkan diri sebagai Capim dan Calon Dewas KPK periode 2024-2029 tercatat pada sistem berbasis elektronik tersebut.

Nantinya setelah melalui proses pendaftaran dan tahapan selesai lainnya, akan dipilih 10 nama Capim dan 10 nama Calon Dewas KPK yang akan disampaikan kepada Presiden untuk kemudian diteruskan ke DPR RI.

(Ant/San)-d

POLDA METRO JAYA TEGASKAN

Penanganan Kasus Firli Bahuri Profesional

JAKARTA (KR) - Polda Metro Jaya menegaskan, hingga saat ini penanganan kasus Firli Bahuri tetap profesional, transparan dan akuntabel.

"Yang jelas penyidikan dalam penanganan perkara aquo dilakukan secara profesional, transparan dan akuntabel," kata Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin (1/7).

Penegasan tersebut sebagai respons terhadap keinginan pihak Firli untuk meminta Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dalam dugaan kasus pemerantasan oleh mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu ke mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL).

Dikatakan, soal pihak Firli yang menyebut tidak terpenuhinya alat bukti atas sangkaan yang dituduhkan, Ade menyebutnya telah mengantongi alat bukti dalam kasus tersebut. "Penyidik dalam penanganan perkara aquo, bukan saja mengantongi dua alat bukti yang sah, bahkan empat alat bukti," katanya.

Ade Safri menambahkan, pihaknya akan memproses kasus ini secara profesional, prosedural dan tuntas.

Sebelumnya, kuasa hukum mantan Ketua KPK Firli Bahuri, Ian Iskandar

menyebutkan, pihaknya mengikuti semua proses terkait perpanjangan pengekalan selama enam bulan atau sampai 25 Desember 2024. "Kita ikuti saja prosesnya, tetapi alangkah elok dan bijaksananya dalam perkara ini Ditreskrimsus Polda Metro Jaya secara profesional untuk mengeluarkan SP3," katanya.

Alasan Ian meminta polisi untuk mengeluarkan SP3 adalah tidak adanya bukti pemerantasan Firli Bahuri ke mantan Menteri SYL. "Tentu ada dasar hukumnya. Pasal 109 ayat 2 KUHAP yang menyatakan penyidik wajib mengeluarkan SP3 terhadap suatu perkara dikarenakan tidak terpenuhinya alat bukti atas sangkaan yang dituduhkan," kata Ian.

Ian juga menanggapi terkait adanya aliran dana Rp 1,3 miliar dari SYL kepada Firli Bahuri. Ia menjelaskan semua sudah diklarifikasi di persidangan. "Kan sudah semuanya diklarifikasi sama penyidik, apakah secara substansial memuat kebenaran? Kan tidak," katanya.

"Menuduh memeras tapi bersaksi motifnya persahabatan, menuduh jadi terdakwa karena tidak memenuhi keinginan Pak Firli Bahuri. Artinya belum ada perbuatan yang dipenuhi," kata Ian.

(Ant)-d

DATA HINGGA AKHIR MEI 2024

KPK Proses 100 Orang Tersangka

JAKARTA (KR) - Selama tahun 2024 berdasarkan data per 31 Mei kasus korupsi yang diproses Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ada 100 orang tersangka. Menurut Ketua sementara KPK, Nawawi Pomolango, mengenai 100 orang tersangka itu berasal dari 93 perkara tindak pidana korupsi yang ditangani KPK, yang telah masuk tahap penyidikan.

Hal itu terungkap dalam rapat kerja antara KPK dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen Jakarta, Senin (1/7). Pada kesempatan itu, Nawawi menyebutkan, masih ada proses hukum tindak pidana korupsi yang berada pada tahap penyelidikan. "Lebih jelasnya ada 93 kegiatan penyidikan, 53 penuntutan, ada 61 perkara yang telah berkekuatan hukum tetap dan ada 50 perkara yang sudah dieksekusi," papar Nawawi.

Ia mengungkapkan, jumlah perkara tertinggi yang ditangani KPK selama 2024 itu soal tindak pidana korupsi ter-

hadap pengadaan barang dan jasa, yakni sebanyak 43 perkara dari perkara keseluruhan. Kemudian dari 100 tersangka, pelaku tindak pidana korupsi yang paling banyak adalah pejabat negara, mulai dari eselon I hingga eselon IV.

Terkait hal itu, menurut Nawawi, KPK menyiapkan Deputi Penindakan untuk langsung memberikan klarifikasi jawaban atas materi-materi penindakan. Selain itu, ia menyampaikan, selama tahun 2024 ini, KPK telah mengembalikan kerugian keuangan negara atas kasus korupsi ke kas negara sebesar Rp 296,5 miliar, berdasarkan data per 31 Mei.

"Jumlah pengembalian yang paling besar berasal dari uang pengganti," kata Nawawi seraya menyebutkan, sejauh ini tren peningkatan pengembalian kerugian negara yang dilakukan KPK mengalami peningkatan pada tahun 2021 hingga 2022. Namun, pada tahun 2023, angka pengembalian

kerugian negara mengalami penurunan.

Menyinggung soal fokus pemberantasan korupsi oleh KPK, menurut Nawawi, dititikberatkan kepada lima sektor, yakni korupsi terkait sumberdaya alam, dunia bisnis, korupsi politik, penegakan hukum dan pelayanan publik. Oleh karena itu, KPK terus mengoptimalkan pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi ke kas negara.

"Ini di antaranya dengan meningkatkan asset tracing, uang pengganti dan pengelolaan barang sitaan agar terjaga nilai ekonomisnya," tandasnya.

Dalam raker dengan Komisi II DPR RI, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengungkapkan, koordinasi dan supervisi antara lembaga antirasuah itu dengan Polri dan Kejaksaan Agung RI tidak berjalan baik. Hal ini, menurutnya, ego sektoral antar lembaga-lembaga tersebut masih terjadi, sehingga menghambat koordinasi. (Ful)-d

DI ATAS TANAH 12.000 M2, DI KARANGANYAR

Rumah Pensiun Presiden Jokowi Mulai Dibangun

KARANGANYAR (KR) - Pembangunan rumah pensiun Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Jalan Adi Sucipto, Desa Blulukan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah mulai berjalan, ditandai dengan peletakan batu pertama.

Camat Colomadu Dwi Susilo Adi di Karanganyar, Senin (1/7) mengatakan, peletakan batu pertama dilakukan Senin kemarin secara tertutup. "Njih (iya). Tadi saya konfirmasi, acara berlangsung sampai dengan jam 09.00 pagi, terus langsung selesai, kajang (tenda) dibongkar dan dari Paspampres dilarang mengambil foto dan drone," katanya.

Ia mengaku tidak memperoleh undangan terkait acara tersebut. "Sepertinya tidak ada yang diundang, sepertinya agenda keluarga calon pemilik rumah," katanya.

Sebelumnya, lahan seluas 12.000 meter persegi tersebut dibersihkan selama seminggu untuk selanjutnya dilakukan proses pembangunan. Pada minggu lalu ia juga sempat meninjau lokasi pembangunan rumah Presiden Jokowi. Ia mengatakan luas lahan yang akan dibangun sekitar 12.000 m2. "Jadi dari luar ada info beda yang disampaikan. Luar ada penambahan dari sebelumnya dari seluas 9.000



KR-Antara/Aris Wasita

Lahan bakal rumah pensiun Presiden Joko Widodo di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah.

m2," katanya.

Dwi Susilo mengatakan, kontraktor atau pengembang pembangunan rumah tersebut PT Tunas Jaya Sanur.

Sebelumnya, Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara Setya Utama mengatakan, Presiden Jokowi memilih sendiri lokasi rumah pensiun di Karanganyar, yang diberikan negara setelah menanggalkan jabatan presiden. "Presiden sendiri yang meminta dan memilih lokasi rumah kediaman beliau. Pertimbangannya beliau sendiri dan keluarga tentunya yang mengetahui," kata Setya melalui pesan

singkat kepada wartawan di Jakarta.

Untuk luas lahan rumah pensiun presiden tersebut, kata Setya, sesuai pagu anggaran yang ditentukan. Besaran anggaran tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) Nomor 120/PMK.06/2022 tentang Penyediaan, Standar Kelayakan, dan Perhitungan Nilai Rumah Kediaman bagi Mantan Presiden dan/atau Mantan Wakil Presiden RI. "Rumah bisa langsung ditempatkan dan menjadi hak milik, bisa diwariskan kepada ahli waris beliau," ujar Setya.

(Ant)-d